

## ABSTRAKSI

Rivalitas etnisitas dalam arena politik dan birokrasi di Kabupaten Belu merupakan suatu gambaran nyata bahwa persoalan “perebutan jabatan dan kekuasaan” baik dalam arena politik dan birokrasi yang syarat dengan kepentingan politik telah menimbulkan persaingan tidak sehat antara para pejabat baik politik maupun birokrasi yang berasal dari wilayah Belu Utara maupun Belu Selatan.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik analisa data kualitatif disamping teknik triangulasi, diperoleh gambaran bahwa rivalitas etnisitas dalam arena politik dan birokrasi di Kabupaten Belu merupakan hasil desain politik kolonial Belanda yang belum diselesaikan secara tuntas, dan semangat/roh konflik yang terjadi waktu itu, telah berpindah dalam arena politik dan birokrasi dewasa ini dan dijadikan moment/ajang dendam politik secara terus-menerus antar kedua wilayah baik Belu Utara maupun Belu Selatan.

Disamping itu, akses pendidikan yang diperoleh pertama kali oleh masyarakat di Belu Utara sebagai hasil kebijakan misi katolik, telah melahirkan banyak elit baik dalam bidang politik maupun birokrasi yang berasal dari wilayah Belu Utara sehingga menimbulkan dominasi kekuasaan oleh para pejabat dari wilayah Belu Utara pada awal terbentuknya Kabupaten Belu. Dan dari sisi Historis, orang Belu Selatan yang masih mengandalkan nostalgia masa lalu sebagai pusat kekuasaan kerajaan seluruh pulau Timor (Maromak Oan di Wehali), sangat lamban dalam perolehan akses pendidikan yang pada gilirannya mengalami miskin kaderisasi yang mampu menduduki jabatan dalam bidang politik maupun birokrasi.

Persoalan lain, meskipun kebijakan otonomi daerah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri secara bertanggung jawab ternyata belum disikapi secara arif dan bijaksana oleh para elit di Kabupaten Belu sehingga semangat/roh konflik yang terjadi pada masa lalu terus dipelihara hingga saat ini. Persoalan mendasar terhadap masalah ini yakni belum adanya pengakuan dan kesadaran oleh para elit politik local terhadap rivalitas etnisitas yang terjadi antara para elit di kedua wilayah tersebut, menyebabkan aksi saling balas membalas yang dikemas secara rapi dengan berbagai argumen dan kebijakan yang diterapkan, menyebabkan rivalitas tidak sehat tersebut terus dipelihara dari waktu ke waktu.

Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan yang efektif untuk mencegah agar rivalitas etnisitas yang terjadi dalam arena politik dan birokrasi dapat segera dicegah melalui consensus politik maupun penerapan secara ketat system meritokrasi dengan tetap menjunjung tinggi sikap persaudaraan orang Belu “Husar Binan Rai Belu” melalui cara-cara yang damai baik “Tur Hamutu atau Hakawak” dalam semangat persaudaraan orang Belu.

Kata Kunci : Rivalitas, etnisitas, politik dan birokrasi, consensus, dan meritokrasi.

## ABSTRACT

Ethnicitas Rivality in bureaucratic and politic arena in Belu district is a factual feature that problem of excessive sense of community has caused latent conflict between political or bureaucratic official in North Belu and South Belu area.

Using qualitative research method and qualitative data analysis technique as well as triangulation technique, the study indicated that ethnical conflict in bureaucratic arena in Belu district was result of Dutch colonial's unfinished political design and conflict spirit occurred at the time still become political revenge until cuurent leadership.

In addition, access to education, obtained firstly by North Belu people as result of catholic missionary policy have brought about many elites either in political or bureaucratic field originated from North Belu that, in turn, create superior spirit in North Belu people. At historical side, South Belu people that still relied on past nostalgia as center of kingdom in Timor island, is very slow on access to education that in turn have less cadre that capable of getting political and bureaucratic position.

Local autonomy policy to give opportunity for local to develop themselves have not responded wisely by local elite, so the past conflict spirit still occur today. The basic problem is that there is no acknowledgement and awareness of local political elite on the latent conflict occurred between the elites form both area that result in revenge actins frames neatly with some arguments and policy applied causing the conflict still maintained over time.

Therefor it needs effective policy to make the latent conflict can be stopped through local wisdom, that is, sitting together (Tur Hamutu/Hakawak) in local cultural side, and in governmental side, by implementing principles of good governance and mechanism of appointment a structural official should still give priority on professionalism value and spirit and consider ethnic balance aspect in order to eliminate ethnic domination occurred until now.

Key words : Ethnic conflict, bureaucratic, local wisdom, professionalism